

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian di Jawa Tengah ini tidak akan terlepas dari suatu peran ekonomi yang sedang dijalankan oleh pelaku kegiatan tersebut. Suatu pergerakan yang ada di perekonomian itu sangat mempengaruhi suatu cara para pengusaha untuk menjalankan bisnisnya , perkembangan bisnis untuk pengusaha, dan seberapa dinamisnya usaha yang dapat dilakukan pebisnis. Karena itu, katanya, kepiawian para pengusaha dalam menjalankan usahanya sangat memengaruhi perkembangan ekonomi di Jawa Tengah, khususnya Semarang. Banyak pebisnis di Jawa Tengah yang mengembangkan usaha yang sedang dijalaninya dengan berbagai bantuan dari lembaga keuangan di Jawa Tengah.

Dibentuknya Lembaga keuangan syariah adalah untuk mengenalkan sekaligus mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah islam, seperti bank syariah yang dalam usahanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya, terdapat lembaga keuangan syariah dalam bentuk koperasi yaitu Koperasi simpan pinjam serta pembiayaan syariah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Dalam peraturan ini Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang mempunyai kegiatan usaha yang meliputi simpanan, pinjaman dan

pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Koperasi memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Konsep ekonomi syariah sudah mulai di terapkan mulai tahun 1991 yang diawali dengan berdirinya bank yang pertama berbasis syariah yaitu bank muamalat indonesia (BMI). Kemudian perkembangan muncul juga lembaga keuangan yang hampir sama lainnya termasuk lembaga keuangan yang menempatkan dirinya bagi usaha kecil yaitu berdirilah Koperasi Syariah (KJKS), namun nama itu sering juga disebut dengan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Dan untuk dasar hukum untuk BMT sendiri yaitu Koperasi Syariah.

PSAK Nomor 102 merupakan Sistem Informasi Akutansi yang berhubungan pada pembiayaan murabahah yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi atau menjual suatu barang dengan menegagaskan harga belinya terhadap pembeli dan penjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dan ini dapat membuat keuntungan tersendiri karena dengan membeli dengan laba yang ringan dan dapat mencicil dengan cicilan yang ringan , itu dapat menambah keuntungan pada usaha mikro. Karena kalo ingin meminjam modal barang usaha itu dengan harga yang murah dan tidak membeban si nasabah lagi. Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BMT AL-HIKMAH Kabupaten Semarang”**

1.2 Rumusan Masalah

PSAK Nomor 102 merupakan Sistem Informasi Akuntansi yang berhubungan pada pembiayaan murabahah yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi atau menjual suatu barang dengan menegagaskan harga belinya terhadap pembeli dan penjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba

Bserdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengajuan atau prosedur umum pembiayaan murabahah pada BMT AL-HIKMAH Kab. Semarang ?
2. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BMT AL-HIKMAH Kab. Semarang tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendapatkan bukti empirik bagaimana cara pengajuan atau prosedur umum pembiayaan murabahah pada BMT AL – HIKMAH Kab.Semarang
2. Untuk mendapatkan bukti empirik bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada BMT AL-HIKMAH Kab.Semarang

1.4 Manfaat Bagi Penulis

Manfaat yang akan didapatkan untuk melakukan penelitian adalah :

1. Bagi peneliti, dapat mempelajari dan memperoleh pengetahuan tentang inti dari pembiayaan murabahah dan mengetahui apa saja peningkatannya dalam pendapatan
2. Bagi BMT Al Hikmah, dapat menjadi pemacu untuk dapat meningkatkan suatu usaha pendapatan di wilayah BMT Al Hikmah Ungaran
3. Bagi Masyarakat, dapat menjadikan bahan acuan untuk penelitian yang selanjutnya dari pihak-pihak lainnya